



▶ ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

## Masih Ada Anomali Data di Jogja

**JOGJA**—Data anomali kependudukan masih terjadi di wilayah Kota Jogja. Hingga semester I/2019, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja, tercatat ada 63 data kependudukan berstatus anomali.

Harian Jogja  
[redaksi@harianjogja.com](mailto:redaksi@harianjogja.com)

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Joko Setyadi mengatakan data anomali kependudukan merupakan data penduduk yang tidak lazim dan belum diketahui kebenarannya, misalnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang masih salah dan terdapat duplikat data dengan kota lain.

"Pada semester I/2019 ada 63 data yang masuk kriteria anomali data kependudukan. Data ini kami dapat dari Pusat dan bisa dicek datanya sesuai dengan aslinya," ucap dia saat ditemui di Kantor Disdukcapil Kota Jogja, Kamis (26/9).

Biasanya, kata dia, dinas selalu mencermati *feedback* dari Pusat untuk melihat apakah data penduduk tersebut masuk kriteria anomali apa tidak. "Di Kota Jogja, dari 63 yang

▶ Data anomali kependudukan merupakan data penduduk yang tidak lazim dan belum diketahui kebenarannya.

▶ Masyarakat akan merugi jika data kependudukannya belum diperbarui.

masuk dalam kriteria anomali data kependudukan kebanyakan yaitu NIK tidak sesuai dengan data NIK Kota Jogja yang terbaru dan duplikat data atau data ganda," ujar dia.

Sejauh ini Disdukcapil Kota Jogja sudah berupaya agar data anomali kependudukan tidak terjadi. Salah satunya memberikan pemberitahuan kepada masyarakat yang datanya masih salah, agar segera dikoreksi. Selain itu dinas juga memberikan surat secara langsung ke masyarakat untuk datang ke kantor agar datanya dapat diperbarui.

Dia menegaskan masyarakat akan merugi jika belum data kependudukannya belum diperbarui. Beberapa kerugian adalah masyarakat tidak bisa mengakses layanan publik, seperti mengurus surat izin mengemudi (SIM), pembuatan KK, mengurus BPJS maupun pembuatan rekening BANK di Kota Jogja. "Biasanya masyarakat yang belum memperbarui datanya akan kesulitan mengakses layanan

publik dan pasti akan ditolak karena data tidak ketemu atau tidak ada," kata dia.

Dia berharap masyarakat Jogja bisa lebih sadar pentingnya pembaharuan data kependudukan. Lagipula menurut Joko mengurus data kependudukan tidaklah sulit. Jika data yang sudah diserahkan sudah lengkap pasti akan segera diurus dan dibuat oleh Dinas.

"Apalagi sekarang sudah ada *Jogja Smart Service* (JSS) yang bisa memudahkan pengurusan data penduduk, karena tidak lagi harus pergi ke Kantor Disdukcapil. Dengan catatan data yang dikirim sudah lengkap pasti akan segera kami urus, jika selesai kami hubungi tinggal ambil saja tanpa harus bolak balik ke Dinas," ucap dia.

Sebelumnya, Kepala Disdukcapil Kota Jogja Sisruwadi menjelaskan dinas kini tengah berupaya untuk meningkatkan jumlah wajib KTP yang melakukan perekaman. Tak hanya pasif, Disdukcapil Jogja diakui dia gencar melakukan jemput bola dengan berbagai upaya.

"Beberapa di antaranya mendatangi sekolah swasta dan menysar siswa yang merupakan wajib KTP baru dan belum melakukan perekaman agar bisa segera melakukan perekaman," kata dia. (M127)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005